

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

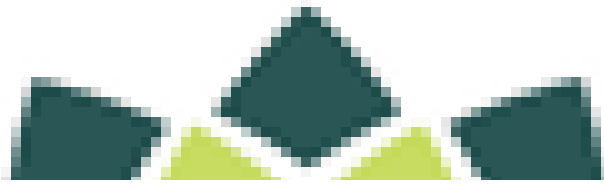
Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah partai yang kelahirannya dibidani oleh warga Nahdlatul Ulama (NU),¹ atas dorongan warga NU dan Gus Dur menjadi kepala bidannya.² Bagi orang NU partai hanyalah sarana meningkatkan pelayanan kepada rakyat, terutama kepada rakyat kecil. Sehingga dalam hal ini PKB telah menjadi partai modern yang netral, efisien, kompeten untuk mengejar kepentingan publik. Artinya, PKB dalam berpolitik selalu mengesampingkan kepentingan kelompok dan menjunjung tinggi prinsip profesionalisme dan kepentingan publik.³

Cukup menarik, ketika mengikuti kiprah PKB dalam percaturan politik nasional. Beragam manuver sering dilakukan PKB demi mendominasi, mengintervensi kebijakan dan mencapai rancangan perjuangan politik dalam jangka panjang. Sebagai jawaban atas bukti historis ini, dalam merancang dan memperjuangkan agenda politik (kerakyatan) PKB menginginkan lahirnya kelompok pemilih baru disamping para pemilih yang telah ada. Oleh karena itu, harus ada penawaran baru atau penawaran yang lebih baik bagi para pemilih.

¹ Adalah "pemegang saham" bagi lahirnya publik ini, NU merupakan emas Islam terbesar di dunia Islam, yang lahir jauh sebelum republik ini berdiri. Lihat Sobary, Mohamad. *NU dan Keindonesiaan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 13

² Mustofa Bisri. A. *Gus Dur Garis Miring PKB*, Surabaya: Mata Air Publishing Surabaya, 2008, hlm. 37.

³ Munir Murchan. Abdul. *Perjalanan Politik Gus Dur*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010, hlm. 19.



Schroder⁴ menganalogikan proses politik yang demikian seperti konsep ekonomi dengan mekanisme *supply and demand*. Dalam hal ini, PKB patut memperhitungkan kekuatan dari semua unsur baik yang berada di internal maupun di eksternal partai sebagai bentuk kehati-hatian dan keseruisan terhadap pencapaian cita-cita bersama.

Sebagai masyarakat majemuk, masyarakat Indonesia memiliki dua ciri yang unik. Secara horizontal, ia ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan suku-bangsa, perbedaan-perbedaan agama, adat serta perbedaan-perbedaan kedaerahan. Secara vertikal, struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan kelas atas dan lapisan kelas bawah yang tajam.⁵ Masyarakat multikultural merupakan fenomena masyarakat modern. Interaksi antar suku bangsa, ras dan etnis semakin menguat seiring berkembangnya globalisasi dan modernisasi. Akan tetapi, peradaban agama-agama sudah sejak lama mempraktikkan kemajemukan ini.⁶ Dalam konteks demokrasi, kenyataan kemajemukan menjadi persoalan yang cukup serius. Sebab demokrasi pada prinsipnya sangat menjunjung tinggi realitas perbedaan.⁷ Seorang ahli sosiologi menggunakan faktor-faktor ini untuk mengembangkan sintesa-sintesa abstrak yang memungkinkannya memberikan definisi terhadap jenis-jenis masyarakat yang berbeda.⁸ Dengan demikian, signifikansi perbedaan pandangan politik masyarakat Indonesia begitu mencolok.

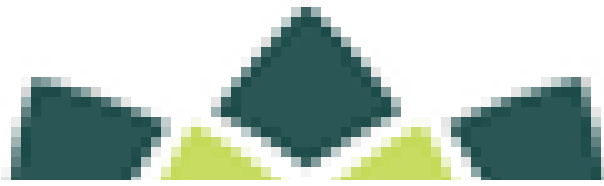
⁴Mufti, Muslim, *Teori-Teori Politik*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hlm. 242.

⁵Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 34.

⁶Nasrullah Jamaudin, *Adon, Agama dan Konflik Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, 2015, hlm. 91.

⁷Nasrullah Jamaudin, *Adon, Agama dan Konflik Sosial*, hlm. 92.

⁸Duvrger, Maurice, *Sosiologi Politik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 117.



Secara langsung atau tidak langsung, secara sadar atau tidak sadar, secara tertulis atau tidak tertulis, antara pandangan politik dan struktur masyarakat memiliki hubungan dialektis yang tidak bisa dilupakan.

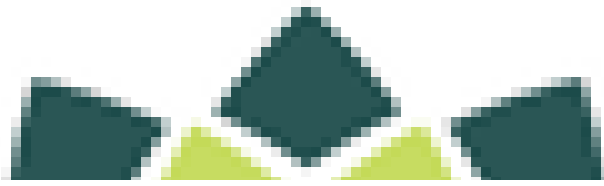
Menurut para teoretisi elit,⁹ kelompok minoritas merupakan satu dari beragamnya sumber kekuatan politik yang perlu dianggap keberadaannya. Dalam praktiknya, teori elit menolak tentang kedaulatan dan kebebasan rakyat. Teori elit berfokus pada perubahan yang berasal dari atas, melalui aktivitas elit yang berkuasa (penguasa, pemerintah, manajer, administrator dan lain-lain).¹⁰ Kaum elit memiliki keinginan, khususnya, memiliki sarana moral, intelektual dan material untuk memaksakan keinginannya kepada orang lain, akan memimpin dan memerintah mereka meski pun dengan memanipulasi komunikasi serta praktik demokratis. Pareto membedakan dua jenis teori elit: mereka yang unggul dalam hal kecerdikan dan kelicikan politik (yang dia sebut 'para rubah') dan mereka yang memiliki keberanian dan kepemimpinan militer tinggi ('para singa').¹¹ Bagi Dwaine Marvick, meski pun elit sering dipandang sebagai kelompok yang terpadu, anggota-anggota elit dengan elit lain sering bersaing dan berbeda kepentingan. Persaingan dan perbedaan kepentingan kerap terjadi dalam perebutan kekuasaan atau sirkulasi elit.¹² Oleh karena itu, pengejawantahan makna memperluas gerakan demi memperoleh kelompok pemilih baru dengan memanfaatkan perebutan kekuasaan dari kaum elit adalah kerja-kerja politik yang harus diselesaikan.

⁹Faulks. Keith, *Sosiologi Politik Pengantar Kritis*, Bandung:Nusa Media, 2012, hlm. 64.

¹⁰Satomplek. Pion, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta:Prenadamedia Group, 2004, hlm. 324.

¹¹Faulks. Keith, *Sosiologi Politik Pengantar Kritis*, hlm 64.

¹²Muhammad. Muslih, *Teori-teori Politik*, hlm 75.



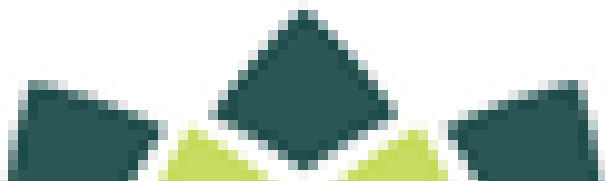
Anti-statisme adalah ciri paling jelas dari gerakan sosial. Oleh karenanya, gerakan sosial menjadi bahasan khusus dalam analisis mengenai hubungan antara aktor-aktor politik dan perubahan sosial. Bangunan relasi ini seringkali bertransformasi melalui aksi-aksi gerakan sosial dalam usaha menjalankan dan mencegah perubahan sosial.¹³ Para pakar ilmu sosial banyak yang menyimak peran khas dari gerakan sosial ini. Mereka melihat gerakan sosial sebagai salah satu cara untuk menata ulang masyarakat modern; sebagai pencipta perubahan sosial; sebagai aktor historis; sebagai agen perubahan kehidupan politik atau pembawa proyek historis.¹⁴ Contohnya, Lenin dalam bukunya berbuat apa? Menegaskan bahwa gerakan sosial kaum buruh bukan hanya sebatas perjuangan ekonomis melainkan perjuangan menuju semangat revolusioner-sosialis kaum buruh.¹⁵ Lebih lanjut, terkait ini, kepala polisi politik Rusia menyuarakan kekhawatirannya;

“Dalam tiga atau empat tahun belakang, pemuda Rusia yang santai telah diubah jadi sejenis intelektual semi melek huruf yang menganggap bahwa sudah tugasnya untuk menolak agama dan keluarga, untuk mengabaikan hukum dan untuk membantah serta mengolok-olok pejabat dan pihak yang berwenang. Untungnya, pemuda-pemuda demikian belum banyak di pabrik namun

¹³Faulks. Keith, *Sosiologi Politik Pengantar Kritis*, hlm. 138.

¹⁴Satompla Piori, *Sosiologi Perubahan Sosial*, hlm. 323.

¹⁵Magnis-Suseno. Franz, *Dalam Bayang-Bayang Lenin: Enam Pemikiran Marxisme dari Lenin Sampai Tan Malaka*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016, hlm. 11.



segelintir yang tidak signifikan ini meneror mayoritas buruh yang diam dan akhirnya mengikutinya.”¹⁶

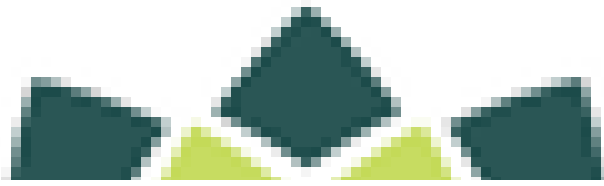
Selain itu gerakan sosial tidak jarang berhasil memodifikasi cara penyampaian dari beragam kepentingan dan aspirasi rakyat. Seperti halnya di India, Mesir, Indonesia dan berbagai negara lainnya terdapat gerakan sosial yang dilandaskan pada lelucon semacam manifesto politik. Sebagai wahana ekspresi politis, lelucon sebenarnya memiliki kegunaan tersendiri. Minimal ia akan menyatukan Bahasa rakyat banyak dan mengidentifikasi masalah-masalah yang dikeluhkan dan diresahkan.¹⁷ Sejauh ini penulis tidak bisa mengukur sejauh mana keberadaan gerakan sosial memainkan perannya dalam percaturan politik lokal maupun global.

Dalam konteks geopolitik lokal maupun global yang perlu dicermati adalah penguatan, perluasan dan perebutan kekuasaan di sektor politik agraria. Artinya, realitas material tentang gelanggang perjuangan perebutan kekuasaan, politik agraria menempati sektor yang strategis. Sebagai contoh, dalam ritual politik 2014, kedua pasang kandidat Calon Presiden dan Wakil Presiden sama-sama mengemukakan pentingnya Indonesia memiliki ketahanan pangan yang baik.¹⁸ Dengan mengeluarkan pernyataan yang senada keduanya mengharapkan masyarakat memiliki pandangan yang positif terhadap proyek perjuangan politik dari kedua kandidat tersebut. Dalam sejarahnya, politik agraria adalah kajian serta

¹⁶ Negoro. Dipo, *Revolusi Kaum Buruh di Abad Kedua Puluh*, Yogyakarta: Bintang Nusantara, 2014, hlm. 20.

¹⁷ Wahid. Abdurrahman, *Fuhan Tidak Perlu Ditela*, Yogyakarta: LKIS, 2011, hlm. 209

¹⁸ Bernstein Henry dan Behriadi. Dianto, *Tantangan Kedaulatan Pangan*, Bandung: ARC Book, 2014, hlm. 1.



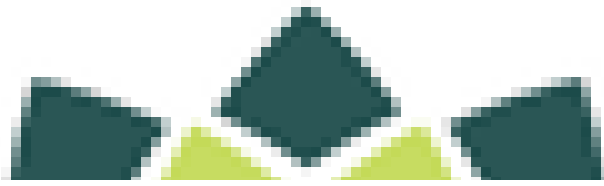
kehidupan nyata masyarakat tentang ekologi politik yang sungguh menarik. Hingga kini masih terdapat ratusan konflik agraria yang meledak-ledak. Hendro Sangkoyo¹⁹ mengaitkan empat komponen (yaitu konflik agraria tentang: tata-kuasa, tata-guna, tata-produksi dan konsumsi) dengan krisis keselamatan/kesejahteraan rakyat, krisis layanan alam, dan krisis produktivitas serta menantang bagaimana usaha gerakan sosial yang mempromosikan reforma agraria dapat mengurus ketiga krisis itu. Menurut Michael Watts terdapat tiga perangkat analitis ekologi politik. Pertama, bahwa kemiskinan, kerusakan alam, dan ketertindasan sesungguhnya adalah tampil saling menguatkan satu sama lain. Kedua, gejala pengurasan, penghilangan hingga perusakan mutu alam yang mengancam umat manusia. Ketiga, keterbatasan, bias, kepentingan maupun ideologi yang diidap oleh berbagai pihak, baik yang menjadi sutradara, produser, aktor utama, pemain figuran maupun penonton yang menjadi korban atau penikmat, mau tidak mau menyadarkan kita bahwa terdapat ragam persepsi, definisi, analisis, kesimpulan hingga rekomendasi mengenai data seputar perubahan agraria itu.²⁰ Dari perkembangan sejarah politik agraria, yang paling bahaya adalah penjajahan dengan mengeksploitasi sumber daya menggunakan serta tampil dengan wajah baru yang lebih menarik. Misalnya, kedudukan pemerintah diganti oleh usahawan perkebunan, kerja paksa diganti dengan kerja upah, wajib serah tanah diganti dengan sewa tanah.²¹ Politik agraria yang selama

ini berlaku cenderung dinikmati oleh sekelompok elit belaka, baik elit lama

¹⁹ Fauzi Rahman Noer, *Politik Agraria dan Pakuan Pajajaran*, Bandung: Yayasan Pusat Studi Sunda, 2014, hlm. 10

²⁰ Fauzi Rahman Noer, *Politik Agraria dan Pakuan Pajajaran*, hlm. 16

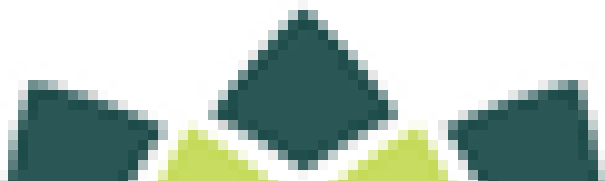
²¹ Kartodirdjo Sartono dan Suryo Djoko, *Sejarah Perkebunan di Indonesia Kajian Sosial Ekonomi*, Yogyakarta: Aditya Media, 1991, hlm. 84.



maupun elit baru yang berhasil merapat atau memperoleh sokongan dan membentuk oligarki politik agraria baru. Karakteristik politik agraria yang memiliki sifat menindas serta membawa kepentingan golongan tentunya bukanlah ruh dari strategi politik PKB sebagai partai dengan keberpihakan penuh kepada orang tidak berpunya. Transformasi kebudayaan di wilayah politik agraria perlu dilakukan, sebagai wujud anti-tesa dari keumuman budaya politik yang menafikkan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, reformasi politik menuju reforma agraria sejati menjadi tawaran politik yang begitu menggiurkan. Bagi penulis, dengan narasi singkat di atas, dipandang perlu mengikuti dan meneliti sejauh mana, sejernih apa pembacaan PKB terhadap realitas dalam menentukan titik pijak dari hegemoni politik menjelang pilpres 2019 mendatang.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena-fenomena sebagaimana pada latar belakang dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut. Pertama, Indonesia adalah negara-bangsa dengan struktur masyarakat yang beragam. Kedua, dalam percaturan politik nasional, kaum minoritas atau kelompok elit selain memiliki posisi yang strategis juga memiliki kekuatan yang perlu untuk diperhitungkan demi pencapaian tujuan politik kerakyatan. Ketiga, dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, sebagai negara demokratis, Indonesia secara hukum melindungi dan menampung aspirasi politik rakyat melalui gerkan-gerakan sosial kemasyarakatan. Keempat, permasalahan politik agraria yang tak kunjung usai dalam perjalanan sejarah Indonesia. Dengan demikian, penulis menjadikan "Hegemoni Politik dan Pemenangan Pemilu" (Studi Deskriptif Terhadap



Hegemoni Politik DPC PKB Menjelang Pilpres 2019) sebagai judul untuk memberikan penjelasan tentang apa yang akan kita bahas selanjutnya.

1.3. Rumusan Masalah

1. Apa definisi hegemoni politik?
2. Bagaimana strategi politik DPC PKB Tuban di pilpres 2019?
3. Bagaimana implementasi hegemoni politik DPC PKB Tuban di pilpres 2019?
4. Apa factor pendorong dan penghambat pelaksanaan hegemoni politik DPC PKB Tuban di pilpres 2019?

1.4. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui definisi hegemoni politik.
2. Untuk mengetahui strategi politik DPC PKB menjelang pilpres 2019.
3. Untuk mengetahui implementasi hegemoni politik DPC PKB Tuban di pilpres 2019.
4. Untuk mengetahui factor pendorong dan penghambat pelaksanaan hegemoni politik DPC PKB Tuban di pilpres 2019.

1.5. Keuntungan penelitian

1.5.1. Keuntungan akademis

Hasil penelitian ini akan dapat memberikan kontribusi penelitian dalam bidang ilmu sosial. Penelitian ini juga dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, serta dapat memperkaya pengetahuan dalam bidang kemasyarakatan, khususnya ilmu pengetahuan sosial-politik yang mempelajari

politik dalam masyarakat dari zaman ke zaman. Penelitian juga diharapkan dapat menjadi pembahasan yang komprehensif dalam kajian sosiologi secara umum.

1.5.2. Kegunaan praktis

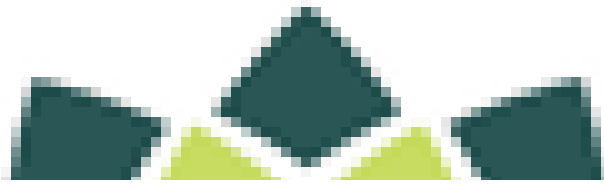
Fokus penelitian ini pada “Hegemoni Politik dan Pemenangan Pemilu” (Studi Deskriptif Terhadap Strategi Politik DPC PKB Menjelang Pilpres 2019).

Semoga dengan adanya hasil penelitian ini bisa menjadi informasi bagi politisi, pengamat politik serta masyarakat Indonesia dan juga meningkatkan daya kritis dalam memberdayakan masyarakat melalui partai politik. Semoga keberadaan partai politik yang beragam selalu tercipta stabilitas politik, kerja sama yang apik antar partai politik di Indonesia.

1.6. Kerangka Pemikiran

Istilah hegemoni berasal dari bahasa Yunani Kuno, eugemonia. Konsep hegemoni banyak digunakan oleh sosiolog untuk menjelaskan fenomena terjadinya usaha untuk mempertahankan kekuasaan oleh pihak penguasa. Penguasa disini memiliki arti luas, tidak hanya terbatas pada penguasaan negara. Hegemoni dapat didefinisikan sebagai dominasi oleh satu kelompok terhadap kelompok lainnya, dengan atau tanpa ancaman kekerasan. Sehingga ide-ide yang didiktekan oleh kelompok yang didominasi dapat diterima sebagai sesuatu yang wajar.

Menurut Mark N. Hogopain, partai politik adalah organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu, melalui praktik kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan. Dengan demikian, basis



sosiologis setiap partai politik adalah adanya ideologi tertentu sebagai dasar perjuangannya dan diarahkan pada usaha untuk memperoleh kekuasaan, mempertahankan dan memperluas kekuasaan.²²

Pemilu menurut Joseph Scumpeter adalah salah satu dari sebuah demokrasi, merupakan salah satu konsepsi modern yang menempatkan penyelenggaraan pemilih umum yang bebas dan berkala sebagai kriteria utama bagi sebuah sistem politik agar dapat disebutkan sebagai sebuah demokrasi. Pemilu merupakan suatu pecerminan dari sitem demokrasi, dengan dilakukannya pemilu dianggap dapat menyuarakan suara rakyat yang sesungguhnya. Di negara-negara yang demokratis, pemilihan umum merupakan alat untuk memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut serta mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah dan sistem politik yang berlaku, oleh sebab pemberian suara pada saat pemilihan umum merupakan bentuk partisipasi politik rakyat.²³

Hakikat sebuah penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah untuk memastikan bahwa rakyat berdaulat. Dalam arti sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin yang dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat melalui kebijakan yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan. Bahwa seorang pemimpin yang dipilih oleh rakyat memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat untuk memastikan terwujudnya keadilan dalam segala aspek kehidupan.

²² Mufti.Muslim, *Teori-Teori Politik*, hlm. 123

²³ Scumpeter, Joseph, *Capitalism, Socialism & Demokrasi* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012 hlm. 18

Skema Konseptual

Terminologi “strategi” banyak ditemukan dalam literature-literatur yang menyangkut studi pertahanan. Kata “strategi” merupakan turunan dari kata Yunani, *strategos*, yang artinya “komandan militer” pada zaman demokrasi Athena.

(Mufti. Muslim, *Teori-Teori Politik*)

Menurut Mark N. Hogopain, partai politik adalah organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu, melalui praktik kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan

(Mufti. Muslim, *Teori-Teori Politik*)

Pemilu menurut Joseph Scumpeter adalah salah satu utama dari sebuah demokrasi merupakan suatu konsepsi salah satu konsepsi modern yang menempatkan penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan berkala sebagai kriteria utama bagi sebuah sistem politik agar dapat disebutkan sebagai sebuah demokrasi.

(Scumpeter. Joseph, *Capitalism, Sosialism & Demokrasi*)